
SIARAN PERS

LPDP Plus: Kesempatan Kerja untuk Semua

Jakarta, 6 April 2016

Tahun ini ketimpangan di Indonesia mencapai 0,41, yang berarti hampir seperlima kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 20% penduduk terkaya. Salah satu faktor penyebab ketimpangan adalah tidak meratanya pasar kerja, di mana sebagian orang tidak sanggup mengakses pasar kerja.

Biro Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 mencatat angka pengangguran mencapai 7,45 juta orang (5,9%) dari total angkatan kerja sebanyak 128 juta. Sebagian besar (45%) pengangguran adalah mereka yang pendidikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Padahal saat ini sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang itu berarti tenaga kerja Indonesia harus siap bersaing dengan tenaga kerja dari Negara-negara ASEAN.

“Ini situasi yang ironi, manakala orang-orang yang pendidikannya kurang dari SMA tidak dapat mengakses lapangan kerja. Lebih jauh lagi, lulusan SMA Kejuruan persentase penganggurannya lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA Umum. Sedangkan Indonesia sudah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun dan anggaran pendidikan telah mencapai 20%”; hal ini semestinya dapat membantu pekerja untuk mengakses lapangan kerja, Kata **Paksi Wolandouw dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia**.

Bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, dan juga seiring dengan rencana pemerintah untuk menurunkan ketimpangan dari 0,41 hingga 0,36 di tahun 2019, upaya-upaya strategis mendesak dilakukan yang dapat memastikan semua masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan Negara-negara lain yang harus diikuti dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID mengusulkan pemerintah perlu bertindak aktif dan mengerahkan seluruh daya dan dana untuk memfasilitasi, mendukung dan menjadi “*a helping hand*” bagi angkatan kerja dan pencari kerja. Untuk itu pemerintah perlu membuat aturan nasional mengenai kewajiban bagi perusahaan swasta, perusahaan BUMN, kementerian dan lembaga menyelenggarakan pemagangan kerja. Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan perlu menyisihkan Rp 20 hingga Rp 30 triliun untuk pelatihan dan pemagangan kerja khusus bagi mereka yang lulus SD hingga SMA, dan mereka yang sudah pengalaman kerja tetapi tidak memiliki ijazah SMP dan SMA. Termasuk Kementerian Keuangan membuka Satu *Window* di LPDP bagi mereka yang lulusan SMA ke bawah.

Siti Khoirun Ni'mah, Program Manager INFID menambahkan Kementerian Pendidikan perlu membangun sinergi dengan dunia industri terutama melakukan identifikasi industri-industri utama di nasional dan daerah yang memiliki *gap* tenaga kerja (jumlah angkatan kerja, kualifikasi dan keahlian kerja). Identifikasi ini dilakukan tidak hanya di nasional namun juga di daerah sehingga ada kepastian kerja bagi lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah-daerah.

Dalam konteks perlindungan buruh migran Indonesia, komponen pelatihan tenaga kerja malah menjadi salah satu komponen eksploitasi dengan mewajibkan calon buruh migran Indonesia membayar uang hingga Rp. 16 juta untuk pembiayaan pelatihan, padahal kualitas pelatihan yang diberikan sangat tidak memadai. Saatnya negara memberikan layanan terbaik pelatihan buruh migran dari sumber-sumber APBN dan sumberdaya lain yang dimiliki negara untuk mengakhiri pembebanan utang bagi calon buruh migrant, ditegaskan oleh **Wahyu Susilo, Policy Analyst Migrant Care**.

Kontak Narahubung:

1. Siti Khoirun Ni'mah, nikmah@infid.org; 0858-8130-5213
2. Paksi Walandouw, walandouw@gmail.com, 0812-9203-513
3. Wahyu Susilo, wahyususilo@gmail.com; 0821-1256-6622